

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR
TAHUN 2014 - 2019

VISI : Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing dan harmonis, masyarakat transmigrasi yang mandiri, dan administrasi kependudukan yang profesional.

MISI : 1. Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja.
3. Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri.
5. Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.

TUJUAN : 1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.
4. Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Misi 1 : Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Tujuan 1 : Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.

Indikator Kinerja Tujuan : % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi.

2019
97,00

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	THN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN/STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KETENAGAKERJAAN													
1	Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja.	1. % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	$\frac{\sum \text{lulusan pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi}}{\sum \text{lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi}} \times 100$ <p><i>Keterangan :</i> Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).</p>	81,20	83,00	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	KEBIJAKAN : Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. STRATEGI : 1. Penguatan daya saing penduduk usia kerja melalui penguatan UPT Pelatihan Kerja sebagai lembaga strategis untuk membekali kompetensi dan membangun keunggulan kompetensi. 2. Menggerakkan dan melakukan pendampingan alumni UPT Pelatihan Kerja melalui peran UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT PPTK). 3. Mengintensifkan fungsi Kios 3in1 dan meningkatkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha. 4. Membangun jaring pengaman TPT melalui Program Pelatihan Alih Kerja (PAKER) atau alih profesi bagi pekerja ter-PHK agar tidak menambah angka penganggur.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. KEGIATAN : 1. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi lembaga pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat. 2. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. 3. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan produktivitas. 4. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan produktivitas. 5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau. 6. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberdayaan SDM kepelatihan dan instruktur. 7. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 8. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan a.l. melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. 9. Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 10. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan pemagangan.	Bidang Latpro, 16 UPT Pelatihan Kerja, UPT PPTK.
	2. % peningkatan tenaga kerja yang dimagangkerjakan : - % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri.	$\frac{\sum \text{calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri tahun ini - tahun sebelumnya}}{\sum \text{calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri tahun sebelumnya}} \times 100$	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00				
	- % tenaga kerja magang ke luar negeri.	$\frac{\sum \text{calon tenaga kerja yang lulus tes dan dimagangkankerjakan ke luar negeri}}{\sum \text{calon tenaga kerja yang mengikuti tes magang kerja ke luar negeri}} \times 100$	17,22	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00				
		3. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas.	$\frac{\sum \text{produktivitas tenaga kerja setelah bimbingan konsultasi - produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan konsultasi}}{\sum \text{produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan konsultasi}} \times 100$ <p><i>Keterangan :</i> Produktivitas tenaga kerja = $\frac{\sum \text{omzet penjualan}}{\sum \text{tenaga kerja}}$</p>	26,83	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00			

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja.

Tujuan 2 : Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.

Indikator Kinerja Tujuan : - % pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
- Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal.

2019
72,00
1 : 8

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	THN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN/STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KETENAGAKERJAAN													
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.	1. % pencari kerja yang ditempatkan. 2. % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu). 3. % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal. 4. Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal.	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$ $\frac{\sum \text{perusahaan anggota aktif PLKT yang menginformasikan lowongan kerja}}{\sum \text{perusahaan anggota PLKT}} \times 100$ <p><i>Keterangan : PLKT = Pusat Layanan Karir Terpadu</i></p> $\frac{\sum \text{TKI yang ditempatkan pada jabatan formal}}{\sum \text{TKI yang ditempatkan}} \times 100$ <p>Tenaga kerja yang mendapat pembinaan di sektor informal dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja baru yang diserap</p> <p><i>Keterangan : Setelah dilakukan pembinaan, dari 1 orang peserta binaan usaha di sektor informal dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak orang</i></p>	58,41	60,00	62,00	65,00	67,50	70,00	72,00	<p>KEBIJAKAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif. <p>STRATEGI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 2. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. 3. Pembedayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal. 	<p>Program perluasan dan penempatan kerja.</p> <p>KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri. 2. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri. 3. Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam dan luar negeri. 4. Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. 5. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan, perlindungan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. 6. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. 7. Perluasan kesempatan kerja. 	Bidang Penempatan TK, UPT P3TKI

Misi 3 : Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Tujuan 3 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

Indikator Kinerja Tujuan : % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial (yang masuk ke pengadilan hubungan industrial)

2019
25,00

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	THN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN/STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KETENAGAKERJAAN													
1	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja.	1. % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. 2. % upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL).	$\frac{\sum \text{kasus perselisihan hub. Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (anjaran)}}{\sum \text{kasus yang ada}} \times 100$ $\frac{\sum \text{rata-rata Upah Minimum Kab./Kota (UMK)}}{\sum \text{rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL)}} \times 100$	39,60	42,00	46,00	50,00	53,00	55,00	57,00	KEBIJAKAN : Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis.	Program pengembangan hubungan industrial & syarat kerja. KEGIATAN : 1. Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. 2. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 3. Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan. 4. Penguatan kapasitas SDM hubungan industrial untuk mendorong terwujudnya iklim hubungan industrial yang kondusif.	Bidang Hub. Industrial & Syarat Kerja

Misi 3 : Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Tujuan 3 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

Indikator Kinerja Tujuan : % penurunan kasus ketenagakerjaan.

2019
15,00

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	THN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN/STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KETENAGAKERJAAN													
1	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.	<p>1. % pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani.</p> <p>2. % penurunan kasus kecelakaan kerja.</p>	$\frac{\sum \text{kasus norma ketenagakerjaan yang ditangani}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100$ $\frac{\text{Selisih } \sum \text{kasus kecelakaan kerja tahun ini - tahun sebelumnya}}{\sum \text{kasus kecelakaan kerja tahun sebelumnya}} \times 100$	75,00	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	<p>KEBIJAKAN : Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan.</p> <p>STRATEGI : Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, peran pengawas ketenagakerjaan, dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>	<p>Program pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.</p> <p>KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan. 2. Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan ketenagakerjaan. 4. Fasilitasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan perlindungan terhadap pekerja perempuan. 5. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja. 6. Pengkondisian lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat, serta tenaga kerja yang sehat dan produktif. 7. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL). 8. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja. 	Bidang Pengawasan KK, UPT K3

Misi 4 : Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri.

Tujuan 4 : Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Indikator Kinerja Tujuan : % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga).

2019
70,00

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	THN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN/STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KETRANSMIGRASIAN													
1	Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran.	1. % penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga).	$\frac{\sum \text{transmigran yang telah dilatih yang ditempatkan}}{\sum \text{transmigran yang ditempatkan}} \times 100$	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	KEBIJAKAN : Pembinaan dan penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan berkualitas. STRATEGI : Meningkatkan koordinasi lintas Provinsi dan Kemnakertrans untuk menambah kuota calon transmigran yang jumlah peminatnya cukup tinggi.	Program Ketransmigrasian. KEGIATAN : 1. Fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk ke luar Jawa. 2. Optimalisasi penempatan calon transmigran. 3. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi lembaga pelatihan. 4. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan bagi penduduk potensial. 5. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	Bidang Mobilitas Penduduk, UPT Latduk
		2. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga).	$\frac{\sum \text{transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya}}{\sum \text{transmigran yang ditempatkan pada lokasi tersebut}} \times 100$ Keterangan : Kriteria keberhasilan transmigran : - Pendapatan meningkat. - Kondisi tempat tinggal bertambah baik.	58,82	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00			

Misi 5 : Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.

Tujuan 5 : Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

Indikator Kinerja Tujuan : % data penduduk yang akurat

2019
100,00

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	THN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN/STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KEPENDUDUKAN													
1	Meningkatnya akurasi data penduduk.	% data penduduk yang akurat.	$\frac{\sum \text{penduduk Jatim yang masuk dalam database kependudukan}}{\sum \text{penduduk Jatim hasil registrasi Kab./Kota yang belum dibersihkan}} \times 100$ <p><i>Keterangan :</i> - Data yang masuk ke dalam database adalah data yg sudah dibersihkan dan masuk di data center (Kemdagri). - Data yang belum dibersihkan adalah data penduduk yg memiliki dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, dan pindah tidak melapor.</p>	92,28	98,48	98,79	99,09	99,39	99,70	100,00	<p>KEBIJAKAN : Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.</p> <p>STRATEGI : Memperkuat jaringan data kependudukan.</p>	<p>Program penataan administrasi kependudukan.</p> <p>KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan. 	Bidang Kependudukan, UPT Latduk